

## USK Canangkan Zona Integritas

🕒 11 July 2021 | Category: Kabar USK

Universitas Syiah Kuala (USK) menunjuk Fakultas Matematika Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) sebagai unit kerja yang akan menerapkan Zona Integritas (ZI). Pencanangan penerapan ZI dilaksanakan di Gedung AAC Dayan Dawood. (Banda Aceh, 9 Juli 2021). Rektor USK, Prof. Dr. Ir. Samsul Rizal, M.Eng dalam sambutannya mengatakan, pencanangan ZI merupakan bentuk komitmen USK untuk memberantas praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Upaya dan usaha untuk mewujudkan USK sebagai ZI, Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM), secara de facto sudah berlangsung sejak lama. "Selama ini berbagai strategi pencapaian disusun untuk mewujudkan pelayanan prima, yang bebas KKN di USK. Di sisi lain, sistem pelayanan dievaluasi secara periodik, dan dilakukan perbaikan di berbagai sisi demi mewujudkan pelayanan terbaik bagi masyarakat," kata Rektor. Namun demikian, ia mengakui bahwa secara de jure institusi ini belum memiliki unit kerja yang memiliki predikat ZI. Karena itu, di tahun ini pihaknya berharap target ke sana akan terealisasi, dengan menunjuk FMIPA yang akan merepresentasikan USK. Ia juga berharap seluruh fakultas, pasca sarjana, unit kerja, lembaga, dll mewujudkan ZI yang bebas KKN. "Penunjukan FMIPA berdasarkan pertimbangan bahwa fakultas ini lebih siap untuk tujuan tersebut. Menurut pengamatan kami, FMIPA adalah unit kerja yang inovatif dalam pelayanan kepada masyarakat," jelas Prof Samsul Rizal. Menurutny, inovasi pelayanan yang dikembangkan secara signifikan akan mampu menutup, atau setidaknya meminimalisir praktik KKN di lingkungan USK, sehingga birokrasi yang bersih akan tercapai dalam pelayanan. Untuk mewujudkan ikhtiar mulia tersebut, Rektor meminta dukungan dan doa dari masyarakat. Sementara itu, Dekan FMIPA USK, Dr. Teuku M. Iqbalsyah diawal pencanangan membacakan deklarasi kesiapan untuk mewujudkan ZI menuju WBK dan WBBM. "Menyatakan secara bersungguh-sungguh akan mewujudkan WBK, menyatakan akan selalu menjauhkan diri dari praktik KKN, serta meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat," ucap Dr. Iqbalsyah. Dekan FMIPA menyatakan siap mensukseskan pencanangan tersebut. Ia percaya, bahwa penggunaan teknologi dapat meminimalisir peluang terjadinya KKN. Pihaknya menyadari, tanggungjawab menjadi ZI tidaklah mudah. Untuk itu, dukungan dan kerjasama semua pihak adalah kunci. "Kami akan persiapkan segala kebutuhan, sebelum diajukan ke Kementerian Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia (Kemdikbudristek) dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) Ini merupakan komitmen bagi kami untuk terus meningkatkan pelayanan," sebut Dekan FMIPA. Sementara itu, Sesditjen Dikti, Dr. Paristiyanti Nurwardani hadir secara daring dalam pencanangan ZI, USK. Ia mengapresiasi langkah yang diambil universitas 'Jantung Hate Rakyat Aceh' tersebut dalam meningkatkan layanan publik dan memberantas praktik KKN. "Kami mengapresiasi apa yang dilakukan USK. Ada banyak komponen yang musti dilakukan, salah satunya adalah lakukan survei internal, untuk memastikan pelayanan publik yang berbudaya," tuturnya.

# USK Canangkan Zona Integritas cegah KKN

🕒 Jumat, 9 Juli 2021 20:20 WIB



Rektor USK, Prof Samsul Rizal melakukan penandatanganan Piagam Pencanangan Pembangunan Zona Integritas di Gedung AAC Dayan Dawood, Darussalam (HO/USK)

**B**anda Aceh (ANTARA) - Universitas Syiah Kuala (USK) menunjuk Fakultas Matematika Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) sebagai unit kerja yang akan menerapkan Zona Integritas (ZI) guna memberantas praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

"Pencanangan ZI ini merupakan bentuk komitmen USK untuk memberantas praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN)," kata Rektor USK, Prof Samsul Rizal di Banda Aceh, Jumat.

Ia menjelaskan penerapan ZI tersebut merupakan salah satu upaya dan usaha untuk mewujudkan USK sebagai Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) yang secara de facto sudah berlangsung sejak lama.

"Selama ini berbagai strategi pencapaian disusun untuk mewujudkan pelayanan prima, yang bebas KKN di USK," katanya.

Ia mengatakan sistem pelayanan terus dilakukan evaluasi secara periodik, dan dilakukan perbaikan di berbagai sisi demi mewujudkan pelayanan terbaik bagi masyarakat.

Rektor mengakui bahwa secara de jure institusi ini belum memiliki unit kerja yang memiliki predikat ZI, karena itu pihaknya berharap target ke sana akan terealisasi, dengan menunjuk FMIPA yang akan merepresentasikan USK.

Ia juga berharap seluruh fakultas, pasca sarjana, unit kerja, lembaga, dll mewujudkan ZI yang bebas KKN.

BERANDA / BERITA / ACEH / USK Menunjuk FMIPA Sebagai Unit Kerja Zona Integritas

## USK Menunjuk FMIPA Sebagai Unit Kerja Zona Integritas

Jum'at, 09 Juli 2021 17:00 WIB



Font:  Ukuran:



Universitas Syiah Kuala (USK) menunjuk Fakultas Matematika Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) sebagai unit kerja yang akan menerapkan Zona Integritas (ZI). [Foto: Ist]

**DIALEKSIS.COM | Banda Aceh** - Universitas Syiah Kuala (**USK**) menunjuk Fakultas Matematika Ilmu Pengetahuan Alam (**FMIPA**) sebagai unit kerja yang akan menerapkan **Zona Integritas** (ZI). Pencanaan penerapan ZI dilaksanakan di Gedung AAC Dayan Dawood. (Banda Aceh, 9 Juli 2021).

Rektor USK, Prof. Dr. Ir. Samsul Rizal, M.Eng dalam sambutannya mengatakan, perencanaan ZI merupakan bentuk komitmen USK untuk memberantas praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Upaya dan usaha untuk mewujudkan USK sebagai ZI, Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM), secara de facto sudah berlangsung sejak lama.

"Selama ini berbagai strategi pencapaian disusun untuk mewujudkan pelayanan prima, yang bebas KKN di USK. Di sisi lain, sistem pelayanan dievaluasi secara periodik, dan dilakukan perbaikan di berbagai sisi demi mewujudkan pelayanan terbaik bagi masyarakat," kata Rektor.

Namun demikian, ia mengakui bahwa secara de jure institusi ini belum memiliki unit kerja yang memiliki predikat ZI. Karena itu, di tahun ini pihaknya berharap target ke sana akan terealisasi, dengan menunjuk FMIPA yang akan merepresentasikan USK. Ia juga berharap seluruh fakultas, pasca sarjana, unit kerja, lembaga, dll mewujudkan ZI yang bebas KKN.

Menurutnya, inovasi pelayanan yang dikembangkan secara signifikan akan mampu menutup, atau setidaknya meminimalisir praktik KKN di lingkungan USK, sehingga birokrasi yang bersih akan tercapai dalam pelayanan. Untuk mewujudkan ikhtiar mulia tersebut, Rektor meminta dukungan dan doa dari masyarakat.

Sementara itu, Dekan FMIPA USK, Dr. Teuku M. Iqbalsyah diawal perencanaan membacakan deklarasi kesiapan untuk mewujudkan ZI menuju WBK dan WBBM.

"Menyatakan secara bersungguh-sungguh akan mewujudkan WBK, menyatakan akan selalu menjauhkan diri dari praktik KKN, serta meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat," ucap Dr. Iqbalsyah.

Dekan FMIPA menyatakan siap mensukseskan perencanaan tersebut. Ia percaya, bahwa penggunaan teknologi dapat meminimalisir peluang terjadinya KKN. Pihaknya menyadari, tanggungjawab menjadi ZI tidaklah mudah. Untuk itu, dukungan dan kerjasama semua pihak adalah kunci.

"Kami akan menyiapkan segala kebutuhan, sebelum diajukan ke Kementerian Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia (Kemdikbudristek) dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) Ini merupakan komitmen bagi kami untuk terus meningkatkan pelayanan," sebut Dekan FMIPA.

Sementara itu, Sesditjen Dikti, Dr. Paristiyanti Nurwardani hadir secara daring dalam perencanaan ZI, USK. Ia mengapresiasi langkah yang diambil universitas 'Jantung Hate Rakyat Aceh' tersebut dalam meningkatkan layanan publik dan memberantas praktik KKN.

"Kami mengapresiasi apa yang dilakukan USK. Ada banyak komponen yang musti dilakukan, salah satunya adalah lakukan survei internal, untuk memastikan pelayanan publik yang berbudaya," tuturnya.



# Pencanangan Zona Integritas FMIPA Universitas Syiah Kuala

kabar-dikti 09 July 2021 | 18.45 WIB



Aceh – Universitas Syiah Kuala (USK) melakukan penandatanganan pakta integritas dalam rangka pembangunan Zona Integritas (ZI) Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Acara tersebut dihadiri oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Paristiyanti Nurwardani dan Sekretaris Tim Zona Integritas Setditjen Dikti, M. Ali Akbar.

Pada kesempatan ini, Paris mengatakan terdapat enam area yang menjadi komponen pengungkit dalam pembangunan Zona Integritas yang akan berdampak kepada peningkatan kualitas pelayanan publik, sehingga benar-benar menjadi pelayanan publik yang berbudaya dan membudayakan berbagai macam pelayanan prima. Paris berharap bahwa perguruan tinggi sudah melakukan pendekatan-pendekatan terhadap fakultas yang ditetapkan sebagai Zona Integritas.

“Saya sangat yakin teman-teman di perguruan tinggi akan melakukan internalisasi enam komponen pengungkit Zona Integritas menuju WBK dan WBBM sesuai dengan Permenpan RB Nomer 10 tahun 2019 dengan sangat masif dan terstruktur,” ujarnya.

Paris juga berharap FMIPA USK akan melakukan kegiatan public campaign terkait dengan perubahan perilaku yang berhubungan dengan antikorupsi dan antinepotisme. Untuk mewujudkan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM, ia pun menghimbau agar Universitas Syiah Kuala dapat melakukan pendekatan-pendekatan dalam pelaksanaan penjaminan mutu internal, agen perubahan Zona Integritas, serta secara rutin membuat laporan capaian, melakukan perbaikan berkelanjutan dan sigap melayani stakeholder.

Terakhir, Paris juga mengingatkan agar USK terus meningkatkan pelayanan tridarma perguruan tinggi khususnya pada transformasi pendidikan tinggi, melalui kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM). Adapun MBKM meliputi delapan kegiatan Kampus Merdeka untuk menyiapkan mahasiswa menjadi lulusan unggul dan berdaya saing. Selain itu, perguruan tinggi juga didorong untuk mencapai delapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Perguruan Tinggi untuk mengakselerasi implementasi Kampus Merdeka.

Sementara itu, M. Ali Akbar menjelaskan Zona Integritas ini merupakan satu hal yang sedang digalakkan di kementerian untuk mendorong unit kerja mendapatkan predikat WBK dan WBBM. Untuk itu, Ali menyebut ada enam area perubahan yang harus dilakukan untuk pembangunan Zona Integritas, yakni area manajemen perubahan, penataan SDM aparatur, area tata laksana, area akuntabilitas, area pelayanan publik, dan area pengawasan.

Pada kesempatan yang sama, Rektor Universitas Syiah Kuala Samsul Rizal menyatakan siap untuk menjadikan USK sebagai Zona Integritas. Beliau turut menjelaskan bahwa FMIPA USK dipilih menjadi fakultas pertama yang dicanangkan sebagai Zona Integritas karena USK merupakan Universitas unggulan di Aceh dan mendapat sebutan jantung rakyat Aceh.

“Saya berharap seluruh fakultas di Universitas Syiah Kuala dan unit kerja akan menerapkan Zona Integritas daerah bebas korupsi dan nepotisme. Berdasarkan pada pertimbangan bahwa FMIPA relatif lebih siap, menurut pengamatan kami FMIPA merupakan salah satu fakultas unit kerja yang mampu menjadikan sistem pelayanan inovatif kepada masyarakat. Inovasi pelayanan yang dikembangkan secara signifikan mampu menutup atau setidaknya meminimalisir praktik korupsi, sehingga birokrasi yang lebih bersih akan tercapai dalam pelayanan,” ujar Samsul.

Pencanangan Zona Integritas FMIPA telah dipersiapkan dengan baik oleh USK yang melibatkan berbagai pihak internal dan eksternal sebagai komitmen dan keseriusan USK menuju WBBM dan WBK. Samsul berharap ke depannya USK dapat menjadi Zona Integritas secara keseluruhan.  
(YH/DZI/FH/DH/NH/SH)

Humas Ditjen Dikti  
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi



Universitas Syiah Kuala mencanangkan zona integritas pada seluruh fakultas termasuk sekolah pasca sarjana di lingkungan kampus tersebut. Hal ini ditandai dengan penandatanganan pakta integritas oleh seluruh pimpinan fakultas dan turut disaksikan Rektor USK Prof. Dr. Ir. Marwan di Gedung AAC Dayan Dawood. (Banda Aceh, 19 Oktober 2023).

Ketua Tim Reformasi Birokrasi USK Prof. Dr. Marwan, M.Si mengatakan, USK untuk pertama kalinya mencanangkan penerapan Zona Integritas (ZI) pada 9 Juli 2021. Kala itu, USK menunjuk Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) sebagai pilot project penerapan ZI ini.

Alasan penunjukan tersebut adalah, atas dasar pertimbangan bahwa fakultas ini lebih siap dan inovatif dalam memberikan pelayanan. Selain itu, komitmen kuat dari pimpinan FMIPA juga menjadi alasan kuat mengapa fakultas ini ditunjuk untuk sebagai unit kerja dalam membangun ZI.

“Jadi kita ingin pembangunan zona integritas tidak hanya berhenti pada FMIPA saja. Tapi pada seluruh fakultas dan sekolah pasasarjana. Maka hari ini kita laksanakan pencangan zona integritas tersebut,” ucapnya.



Selanjutnya, Rektor mengatakan, penerapan reformasi birokrasi dan zona integritas ini merupakan salah satu langkah awal untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif, dan efisien. Upaya ini nantinya diharapkan dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional.

“Oleh sebab itu, komitmen dan dukungan kita semua sangatlah penting. Sebab penerapan ZI ini tidaklah mudah, karena saat ini hanya ada tujuh fakultas di Indonesia yang mendapatkan pengakuan ZI ini,” ucap Rektor.

Sementara itu, Perwakilan Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi M. Ali Akbar mengatakan, pencanangan ZI di USK ini terasa istimewa karena bersamaan dengan perubahan status USK menjadi Perguruan Tinggi Badan Hukum (PTN BH).

Menurutnya, bagaimana keberlangsungan perguruan tinggi menjalankan statusnya sebagai PTN BH sangat bergantung dengan tata kelola birokrasi yang baik. Hal inilah yang menjadi salah satu tujuan hadirnya ZI.

“USK sudah bagus, tapi dengan hadirnya ZI ini USK bisa lebih baik lagi. Karena kita punya cita-cita membawa kampus ini kelas dunia. Maka tata kelola USK tidak bisa ditawar lagi untuk sejajar dengan kampus terbaik lainnya,” ucapnya.

#inspirasiidikti